

PILKADA SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN POLITIK YANG BERMARTABAT DAN DEMOKRATIS (Suatu Tinjauan Etika Dan Politik Hukum)

oleh:

Firdaus Syam

(e-mail: Perspektif_fh_uwks@yahoo.com)

dosen tetap UNNAS Jakarta

Jl. Sawo Manila Pejaten. Pasar Minggu Jakarta Telp. 7883308-7802700 Fax 7802718

Abstract

In context election of regional leader, [at] its it[him] political ethics and norm have important role in grow the way of regional leader candidate someone approach. Integrity, ability and moralitas [do] not only measured from its efficacy [of] meraup as much as possible elector voice, much more important from that [is] how its strength [of] him to followed election process [it] better, this cover; understanding of order, procedure, standard, election mechanism, and [do] not less important develop;build cultural communications as sensivity form or its of

Keyword : *election of regional leader, enableness of politics, democracy and prestige*

"Reformasi Politik," di Indonesia makna itu dalam perkembangan sosial politik yang terjadi sejak tahun 1998 hingga kini, tidak hanya memberikan pemahaman mengenai adanya perubahan dan pembaruan struktur dan sistem politik yang ada, lebih penting dan dapat dirasakan dalam kehidupan nyata sehari-hari adalah: adanya ruang kebebasan politik yang demikian besar dan luas cakupannya, serta terjadinya pergeseran etika-norma sosial yang memiliki implikasi terhadap etika-norma masyarakat politik dimana masyarakat kita dihadapkan pada persepsi tidak lagi dapat membedakan antara makna *kebebasan politik* dengan *kebablasan politik*, antara *tuntutan* dan *pemaksaan*, antara *proses politik* dengan *keharusan politik*, antara *aspirasi kelompok* dengan *aspirasi masyarakat*, antara *protes*

politik dengan kekerasan politik. Hal ini mengantarkan bangsa Indonesia ke dalam krisis sistem politik.

Hal-hal di atas itu yang dapat memicu terjadinya berbagai konflik politik, baik di tingkat elit maupun kelompok masyarakat dalam suatu proses politik yang sedang berlangsung baik proses politik di tingkat nasional maupun pada tingkat lokal.

Namun dalam perkembangan lebih kurang dua tahun terakhir ini, hal itu nampaknya telah mulai disadari oleh warga masyarakat dan bangsa, bahwa berbagai konflik, ketegangan politik, pertentangan dan kekerasan fisik yang dalam proses politik itu nampaknya merupakan kondisi *transisi sosial politik* yang harus dilalui oleh masyarakat dan bangsa Indonesia yang